



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 12 UTARA  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3458015; FAKSIMILE (021) 3447284; SITUS [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

**A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN**

**Nomor Pendaftaran Keberatan** :  
**Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi** :  
**Tujuan Penggunaan Informasi** :  
**Identitas Pemohon I**

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Nomor Telepon :  
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :  
Pokok Wajib Pajak :  
Bersama ini kami lampirkan\*\* :

**Identitas Pemohon II**

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Nomor Telepon :  
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :  
Pokok Wajib Pajak :  
Bersama ini kami lampirkan\*\*\* :

**Identitas Kuasa Pemohon \*\*\*\***

Nama :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :  
Pokok Wajib Pajak :

**B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN\*\*\*\***

- |                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP |
| <input type="checkbox"/> | b. Informasi berkala tidak disediakan                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | c. Permintaan informasi tidak ditanggapi                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta                                                 |
| <input type="checkbox"/> | e. Permintaan informasi tidak dipenuhi                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan                                                    |

**C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)**

.....

**D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:** paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.\*\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, //2026

Mengetahui, \*\*\*\*\*  
**Petugas Pelayanan Informasi**  
**(Penerima Keberatan)**

**Pengaju Keberatan**

( ..... )

( ..... )

**Keterangan:**

- \* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- \*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- \*\*\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- \*\*\*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- \*\*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.